

Susunan Bagan Struktur Pemerintahan Pusat

naskah buku ajar ini, tidak sekadar untuk melengkapi materi kuliah, akan tetapi menjadi "inspirator" bagi mahasiswa untuk melakukan kajian riil di lapangan.

Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab, yaitu pada Bab 4, 9, 10, 12, dan 13. Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan terdapat sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 2 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group. "Saya ucapkan "selamat dan apresiasi" kepada Penulisnya, Saudara Ilham Yuli Isdiyanto, SH, MH, dengan harapan untuk terus melanjutkan kajian berbasis kearifan lokal sebagai peneru alternatif sekaligus menjawab kegelisahan Prof Mubyarto dan Prof. Kuntowijoyo yang telah meletakkan dasar-dasar Pancasila sebagai ilmu sosial yang membunL" Hamengku Buwono Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta "Satu hal yang berbeda pada Ilham dibandingkan ilmuwan lain adalah kepedulian dan kejelaniannya dalam melihat perlunya membangun sistem hu Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Buku karya Ilham ini dapat dipandang sebagai pintu pembuka, dan anjang-ancang untuk perwujudan sistem hukum berparadigma Pancasila." Prof. Sudjito, SH, Msi. Guru Besar Fakultas Hukum UGM "Buku ini hadir di saat yang tepat: saat Pancasila dibutuhkan kembali. Sebagai karya praktisi yang sangat seksama dalam melakukan keilmuan, buku ini menyediakan alasan yang lebih mengena, mengapa kita harus berpancasila dengan percaya diri. Alur penuturannya yang mengalir, dan telaahnya multidisipliner yang di sini menjadikan semakin menyadari: siapa kita." Prof. Drs. Purwo Santoso, MA., Ph.D. Guru Besar Ilmu Politik UGM "Setiap karya untuk memperluas dan mempertajam pemahaman t Pancasila dan dimensi praksisnya perlu mendapat apresiasi yang semestinya. Karya ini adalah salah satu dari renungan dan penelitian seorang penulis muda yang dimaksud." Prof. Dr. Syafii Maarif. Anggota Dewan Pengarah BPIP "Buku ini sangat kaya informasi dan kritis dalam menganalisis sejarah Pancasila, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga saat samping itu, kajian buku ini berbeda dengan sejumlah literatur yang mengkaji Pancasila, karena penulis juga melakukan refleksi dialektis Pancasila dan rekonstruksi pemikiran Pancasila hukum nasional. Yang seringkali ditulis orang lain tentang Pancasila adalah sosok Soekarno, yang dipandang sebagai pencetus Pancasila. Kajian difokuskan pada sejarah perumusan, k hukumnya, serta muatan-muatan filsafati yang terkandung di dalamnya. Perspektif yang berbeda inilah kekayaan yang ada dalam buku saudara Ilham " Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH. M Guru Besar Hukum Tata Negara Ull "Dewasa ini tidak banyak anak-anak bangsa terutama generasi muda yang menaruh minat untuk mengkaji dan menulis tentang Pancasila. Oleh kar tulisan Ilham Yuli Isdiyanto ini sangat menarik dan layak diapresiasi, terutama dalam memperkaya khazanah kajian filosofi bangsa. Selain itu yang layak dihargai selain sebagai penulis tentang Pancasila, juga karakteristik kajiannya yang cukup kreatif dan inovatif dengan melakukan suatu dekonstruksi terhadap pemahaman atas Pancasila terutama dalam hubungan Jati Diri Hukum Indonesia." Prof. Dr. Kaelan, MS. Guru Besar Filsafat UGM

Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 230A/Kep/Menpen/1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia

Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha

Filsafat Manajemen

Struktur organisasi Departemen Kesehatan RI

Buku ini dilengkapi dengan pembahasan konsep-konsep, model-model, dan penerapan serta analisis dalam bidang Kepemimpinan, Tujuan Organisasi, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi " bandul otonomi daerah " menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat mengganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, beserta sejarah pemerintahan daerah. Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dapat diraih dengan mendayagunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Organisasi yang berhasil adalah yang secara efektif mengkombinasikan sumberdaya guna menerapkan strategi-strateginya. Di samping itu, organisasi juga dipengaruhi oleh perubahan faktor

lingkungan di luar organisasi. Oleh karena itu organisasi harus merespon perubahan tersebut agar pencapaian tujuan organisasi tetap dapat dicapai secara efektif. Kemampuan suatu organisasi memberikan reaksi secara tepat terhadap ancaman-ancaman lingkungan guna mewujudkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi sebagian ditentukan oleh strukturnya. Struktur organisasi adalah rumusan peran dan hubungan peran, pengalokasian aktivitas guna memisahkan sub unit-sub unit, distribusi kekuasaan di antara jabatan-jabatan administratif serta jaringan kerja komunikasi formal. Sebenarnya struktur menurut Keban & Santoso (2007:1) adalah " Perencanaan formal guna mencapai pembagian tenaga yang efisien serta efektivitas koordinasi aktivitas-aktivitas para anggotanya " .

Restrukturisasi Organisasi : Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hamengku Buwono IX dan sistem birokrasi pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974

UUD 1945 & Perubahannya

Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, periode tahun 1977/1982

Perilaku Politik

Membaca buku ini akan menampakkan kegalauan penulis antara harapan optimisme penulis tentang ketidakpastian masa depan tanah perkotaan ditengah-tengah dinamika otonomi daerah yang bertujuan meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan. Karya tulis ini, yang semula merupakan disertasi penulis yang telah berhasil dipertahankan pada tahun 2004 dihadapan sidang senat Universitas Sumatera Utara (USU) , memuat usaha penulis untuk mencoba menemukan pemecahan permasalahan proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedemikian rupa tentang apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri. Dalam upaya memenuhi maksud dan tujuan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, ditawarkan sedemikian rupa tentang kebijakan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan masa depan yang sesuai dengan perspektif otonomi daerah dengan intinya bertujuan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Hasil pembentukan pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan tersebut harus dihindari dari penguasaan kaum elitis. Artinya semua produk pengaturan hukum konsolidasi tanah perkotaan dimaksud, dihasilkan hasil semata-mata untuk kepentingan masyarakat (populis).

Buku "Administrasi Umum" untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum 2017. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 3. Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik per semester

Perilaku politik (political behavior) suatu bangsa sangat terkait dengan landasan filosofi negara beserta evolusi organ-organ kenegaraannya; peran pemerintah sebagai "aktor politik sentral; partisipasi warga negara; media massa yang menghembuskan isu-isu politik (political issues) dalam membentuk pendapat umum (public opinion). Buku Perilaku Politik: Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan ini, mempersembahkan pemikiran politik yang digali oleh sari-sari terbaik pemikiran tokoh-tokoh dunia dan tokoh-tokoh Indonesia, serta "aspek-aspek pelaksanaannya semenjak proklamasi kemerdekaan hingga kini." Ada kritik di dalam setiap perilaku yang terjadi, namun terdapat juga sejumlah dorongan untuk memperbaikinya. Melalui perilaku politik (political behavior) seperti ini, diharapkan dapat menyatukan segenap pelaku politik yang beragam etnis, agama, dan budaya. Setiap perilaku politik yang terjadi, sebetulnya bisa menyiratkan nilai kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai demokrasi, yang terus mewujudkan menjadi budaya politik (political culture) yang toleran. Perilaku politik (political behavior) harus tetap menjadi simpatik, walau laku politik nampaknya seperti "baku bunuh" demi suatu kontestasi (persaingan) yang terus terlihat mengabaikan etika dan seluruh aturan mainnya. Sebetulnya dalam perilaku politik, siapa pun tetap bertarung secara benar dan baik karena perilaku politik (political behavior) itu sendiri sebagai medium menuju negara kesejahteraan (the welfare state).

PPN

Tip Membuat Presentasi Bisnis

STRATEGI CERDAS DALAM PENGEMBANGAN, INOVASI DAN PERUBAHAN ORGANISASI

Pergeseran kekuasaan pemerintahan daerah menurut konstitusi Indonesia

Pasca reformasi 1998, berbagai produk hukum untuk menangani dan memberantas korupsi telah dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan corruption perception index Indonesia nilainya semakin membaik, namun diikuti dengan korupsi yang semakin meningkat dan menyebar keseluruh daerah. Sedangkan berdasarkan hasil dari empat penelitian mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap korupsi APBD menunjukkan adanya perbedaan. Dua peneliti menyebutkan bahwa perilaku individu, kelembagaan pemerintahan, peraturan perundangan-undangan, dan pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD, sedangkan satu peneliti lainnya menyatakan bahwa dari keempat variabel tersebut hanya perilaku individu yang tidak berpengaruh terhadap korupsi APBD. Sedangkan satu peneliti lainnya menunjukkan bahwa kelembagaan dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap korupsi APBD. Hasil ini menyebabkan ketidakyakinan apakah faktor-faktor yang diwujudkan dengan perilaku individu, kelembagaan pemerintahan, peraturan perundangan-undangan, dan pengawasan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap terhadap Korupsi APBD. Meta

*analisis digunakan untuk mengatasi hasil penelitian yang berbeda. Meta analisis merupakan penelitian yang menggunakan studi-studi yang telah ada yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Dari empat penelitian, hanya 3 penelitian yang memenuhi persyaratan untuk diolah, dengan total data 615 responden. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap korupsi APBD. Penggantian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah telah dilaksanakan dengan tujuan menghindari kebocoran APBD. Dari keempat variabel tersebut perilaku individu kepala daerah masih terabaikan. Sehingga perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepala daerah melakukan tindak korupsi. Planned Behavior Theory digunakan untuk menjelaskan faktor niat individu dalam berperilaku Metode tabulasi frekwensi, cross tabulasi dan pengujian chi square digunakan untuk memproses data. Sumber data berasal dari profil kepala daerah yang terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015, yang berjumlah 1.051 orang. Hasil penelitian menunjukkan jabatan, gender dan umur merupakan faktor yang mempengaruhi kepala daerah untuk melakukan tindakan korupsi APBD. Hasil penelitian ini merekomendasikan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk mengevaluasi persyaratan calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada dan partai pengusung calon kepala daerah memberi kesempatan yang lebih besar kepada kelompok perempuan dan generasi milenial, mengingat dua kelompok ini cenderung untuk tidak berperilaku korupsi. Sebuah Meta Analisis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak**

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Perubahannya dilakukan dalam empat tahap melalui mekanisme Sidang MPR. Perubahan pertama ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lengkap dengan perubahannya. Untuk menunjang kebutuhan pelajar (SD, SMP, SMA), buku ini dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Pengetahuan Ketatanegaraan Indonesia. Buku Persembahan Penerbit Bmedia Hand-out merupakan bagian penting dalam mendukung optimalisasi pembelajaran, terlebih dalam suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat. Regulasi menuntut dosen untuk menyiapkan Hand-out, pada setiap pembelajaran, untuk mengembangkan bahan belajar digital, learning object (LOM), melalui pendekatan analisis kurikulum. Dengan pendekatan ini dimungkinkan terjadi sinergi antar para penyedia konten pembelajaran, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Penggunaan handout dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang disampaikan oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013: 80), bahwa fungsi handout antara lain adalah: (1) membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat; (2) sebagai pendamping penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; (5) pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7) menilai hasil belajar. Adapun, tujuan penyusunan handout ini, antara lain: (1) untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik; (2) untuk memperkaya pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi LMS dan Gogle class room. Atas dasar itu, maka handout ini, berisi point-point penting dari materi pelajaran yang akan dipelajari sesuai RPS, antara lain; Dimulai dengan; Konsep Dasar Organisasi Kelembagaan; selanjutnya berturut-turut membahas Lingkungan Organisasi Lembaga Pendidikan; Bentuk Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan; Perilaku dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Kekuasaan, politik, wewenang dan tanggungjawab dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Kepemimpinan Organisasi Lembaga Pendidikan; Persepsi komunikasi dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Motivasi Organisasi dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Konflik dan Stres dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Iklim Budaya Organisasi dalam Organisasi Lembaga Pendidikan; Efektifitas Organisasi Lembaga Pendidikan; diakhiri dengan Model Perubahan dan Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan. Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan hand-out dalam pembelajaran maka hendaknya peserta didik mampu menggunakan bahan ajar handout ini secara bijak.

Organisasi perangkat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Hand Out Mata Kuliah Organisasi Lembaga Pendidikan

Menggali Jati Diri Hukum Indonesia

Pasti Bisa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X

INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Buku berjudul Sumber Belajar dan Pusat Sumber Belajar: Teori dan Aplikasinya di Sekolah/ Madrasah sebagai salah satu referensi utama bagi para mahasiswa calon guru, guru, ataupun dosen serta para praktisi pendidikan, khususnya untuk matakuliah pengembangan sumber belajar maupun media pembelajaran. Di samping itu, pertimbangan lainnya juga karena referensi mengenai pengembangan sumber belajar dan pusat sumber belajar di Indonesia sejauh pengamatan penulis masih sangat kurang. Untuk itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi solusi dalam mencukupi ketersediaan kebutuhan buku-buku referensi seperti itu. Buku ini disajikan dengan pembahasan yang lugas dan disertai dengan pemaparan contoh serta aplikasinya di sekolah/madrasah secara perinci dengan harapan dapat memudahkan para pembaca untuk memahami berbagai pembahasan dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok untuk para pembaca, baik yang masih awam tentang pengembangan sumber belajar di sekolah/madrasah, ataupun bagi yang sudah mahir tentang topik buku ini. Cara penyajian seperti inilah yang menurut penilaian penulis masih sulit ditemui dan didapatkan dalam buku-buku referensi tentang pengelolaan sumber belajar dan perpustakaan sekolah/madrasah yang beredar di Indonesia selama ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi kontribusi positif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, baik di sekolah maupun di madrasah, di Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Untuk versi cetaknya, kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2018/3/pasti-bisa-ekonomi-smama-x-k-13-revisi#.YWeICFVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan

ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. □ Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. □ Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). □ Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. □ Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.

Handbook Pemerintahan Daerah Wahana Resolusi

Sebuah Meta Analisis

Audit kinerja pada sektor publik

evaluasi dasawarsa I dan prospeknya

Penyempurnaan aparatur dan administrasi negara Republik Indonesia

Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan

Manajemen Filsafat adalah petunjuk utama yang menggaris bawahi semua tindakan dari seorang manajer. Filsafat manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dan nilai yang pokok untuk memberi petunjuk sesuai dan dapat dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Filsafat manajemen juga memberikan desain sehingga seorang manajer dapat mulai berpikir. Filsafat manajemen amat berguna karena dapat digunakan untuk memperoleh bantuan dan pengikut. Filsafat manajemen memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam majamen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan. Dalam filsafat manajemen, terkandung dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Untuk merealisasikan tujuan diperlukan beberapa faktor penunjang sehingga merupakan kombinasi yang terpadu, baik menyangkut individu maupun kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan adanya keseimbangan diantara faktor-faktor yang diperlukan dalam mencapai suatu kekuatan untuk mengejar hasil yang maksimum.

Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini dan Society 5.0, dimana manusia di tuntut untuk bisa berkomunikasi dengan teknologi, dimana kehadiran pemerintah dirasakan semakin penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan yang sesuai dengan harapan mereka, oleh karena itu pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu berinovasi agar pelayanan yang diberikan bisa efektif dan efisien. Penerapan e-government adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak dan mau tidak mau harus dilakukan dengan semangat inovasi dan selalu mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dan dalam buku ini adalah sebuah refleksi dari inovasi yang pemerintah terapkan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. E-billing dan E-lapor adalah salah satu contoh dari inovasi pelayanan bagi publik yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat terkait dengan perpajakan dan keluhan masyarakat tentang pelayanan yang ada di instansi pemerintah dan inovasi ini tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak ada sosialisasi tentang penggunaannya serta diperlukan SDM yang menguasai Teknologi agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Performance audit on public sector in Indonesia.

Sejarah dan perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Monografi daerah Irian Jaya

Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah

berbagai makalah tentang sistem informasi dari perspektif manusia dan sistem informasi, organisasi dan sistem informasi, teknologi dan sistem informasi yang disampaikan dalam

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2005 di Institut Teknologi Bandung

konsep, praktik, studi kasus

Development information system for various needs in Indonesia; papers.

Public administration in Indonesia.

End-of-office report of former President Habibie's cabinet, May 1998-Oct. 1999.

MANAJEMEN ORGANISASI

Sumber belajar dan pusat sumber belajar. Teori dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah

Panduan Belajar Dan Evaluasi: Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk SD/MI Kelas 4

Sistem informasi

Dekonstruksi Pemahaman Pancasila

Organizational structure of the Dept. of Information, Indonesia; ministerial decision.

Bagi pekerja kantor atau karyawan, baik di swasta maupun pegawai negeri, membangun bisnis online ataupun offline adalah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Padahal, di tengah sulitnya ekonomi Indonesia saat ini, membangun bisnis harusnya merupakan kewajiban bagi tiap warga negara. Mengapa kita harus mulai membangun bisnis? Ada tiga alasan utama, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagai persiapan pensiun atau jika sudah tidak bekerja lagi. Dalam buku praktis ini dijelaskan tahap demi tahap untuk mendirikan berbagai badan usaha, seperti PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, dan perusahaan konsultan. Selain itu, ada pula panduan pengurusan berbagai

perizinan, seperti izin usaha industri, izin gangguan, izin usaha untuk pariwisata & restoran (agen perjalanan, rumah makan, kafe, dan lainnya), ketenagakerjaan (penyalur tenaga kerja), penanaman modal, dan sebagainya. Dengan begitu, pembaca dapat memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. salam RAIH ASA SUKSES toko buku online murah - penebar-swadaya.net

Relationships between legislative and executive power of local governments in Indonesia after reinstated of the Indonesian 1945 Constitution in 1959.

LP3ES.

Pemilihan umum 1987

Handbook Pemerintahan Daerah

Pencak Silat Daerah Bali

Yang berhubungan dengan organisasi badan-badan pelaksana Pemilihan Umum tahun 1977

History of local government in Indonesia.

Role of Sultan Hamengku Buwono IX in reforming the bureaucratic system of Yogyakarta.

ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN

Pemerintahan dan pembangunan kalurahan/desa di DIJ

Pokok-pokok pemerintahan daerah

pegangan pamong kalurahan

sebuah tinjauan historis